



ARTIKEL RISETURL Artikel : <http://ejournal.helvetia.ac.id/index.php/jkg>**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)***Implementation of Non-Smoking Area Policy***Mochamad Taufik Rahman Naufal, Ayu Khoirotul Umaroh^k**

Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email Penulis Korespondensi (^K): aku669@ums.ac.id

Abstrak

Masalah rokok di Indonesia menjadi perhatian utama karena berdampak pada aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan data Riskesdas 2018, 19,16% remaja usia 15–19 tahun di Kota Surakarta merupakan perokok aktif. Pemerintah telah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui berbagai regulasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bebas rokok. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di SMA Sederajat di Kota Surakarta. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 68 SMA Sederajat di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 57,4% sekolah memiliki pola komunikasi yang baik, 70,6% sekolah memiliki sumber daya yang baik, 64,7% sekolah memiliki disposisi yang baik dan 76,5% sekolah mempunyai tata birokrasi yang baik pada implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah. Diketahui sebesar 73,5% sekolah belum memiliki satgas anti rokok, 75% sekolah belum menerapkan sistem *reward* dan 41,2% sekolah belum memiliki SPO. Oleh karena itu, disarankan kepada pihak sekolah untuk melakukan sosialisasi, menyusun SPO, membentuk satuan tugas anti rokok dan menerapkan sistem penghargaan (*reward*) sebagai bentuk apresiasi dan motivasi dalam mendukung keberhasilan kebijakan KTR.

Kata Kunci: Rokok, Kawasan Tanpa Rokok, Implementasi Kebijakan**Abstract**

The problem of cigarettes in Indonesia is a major concern because it has an impact on health, economy, and social aspects. Based on Riskesdas 2018 data, 19.16% of adolescents aged 15-19 years in Surakarta City are active smokers. The government has established a No Smoking Area (KTR) policy through various regulations to create a healthy and smoke-free school environment. The purpose of this study is to find out the implementation of the no-smoking area policy in Equivalent High Schools in the city of Surakarta. The method used was a quantitative descriptive research with a sample of 68 equivalent high schools in Surakarta City. The results showed that 57.4% of schools had good communication patterns, 70.6% of schools had good resources, 64.7% of schools had good disposition and 76.5% of schools had good bureaucratic arrangements in the implementation of the no-smoking zone policy in schools. It is known that 73.5% of schools do not have an anti-smoking task force, 75% of schools have not implemented a reward system and 41.2% of schools do not have an SOP. Therefore, it is recommended to schools to conduct socialization, prepare SOP, form an anti-smoking task force and implement a reward system as a form of appreciation and motivation in supporting the success of the KTR policy.

Keywords: Cigarettes, Non-Smoking Areas, Policy Implementation

PENDAHULUAN

Rokok telah menjadi hal yang seolah menyatu dengan beberapa kalangan masyarakat. Efek rokok telah memengaruhi beragam kelompok masyarakat, baik yang merupakan perokok aktif maupun pasif. Rokok mengandung bahan kimia. Ada sekitar 4000 bahan kimia dalam sebatang rokok. Beberapa zat yang terkandung dalam rokok seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Setyo Budiantoro dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), zat berbahaya dari rokok yang masuk ke dalam tubuh perokok mencapai hingga 25%, sedangkan 75% yang beredar di luar ruangan berisiko masuk ke dalam tubuh orang-orang di sekitar mereka (1). Ada 25 penyakit yang bisa disebabkan oleh rokok. Penyakit-penyakit ini termasuk kanker paru-paru, bronkitis, emfisema, penyakit jantung, dan penyakit paru-paru lainnya (2).

Berdasarkan data dari Riskesdas 2018 Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa persentase perokok di Provinsi Jawa Tengah yang berumur 15-19 tahun sebanyak 12,99%. Adapun persentase perokok usia 15-19 di Kota Surakarta sendiri sebanyak 19,16%. Diketahui juga bahwa masyarakat Kota Surakarta yang memulai kebiasaan merokok pada rentang usia 15 hingga 19 tahun sebanyak 51,81% dan 48,10% diantaranya adalah perokok aktif yang merokok setiap harinya. Jenis kelamin pun dapat menjadi pengaruh atas perilaku merokok pada seseorang. Perilaku merokok lebih sering ditemukan pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan karena didukung adanya kebebasan dalam memperoleh informasi terkait merokok (3). Perilaku merokok yang ada pada anak usia sekolah terutama SMA terjadi karena pada usia tersebut merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa remaja terjadi perubahan kejiwaan sehingga mereka merasakan guncangan baik secara emosi maupun kejiwaan yang berdampak pada penyimpangan terhadap ketentuan dan nilai-nilai sosial yang diterapkan dalam masyarakat (4). Selain itu, perilaku merokok dapat memberikan kepuasan bagi para remaja, terlepas dari efek farmakologis dan pengurangan stress (5).

Menciptakan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup bagi tiap individu dan segala usia adalah tujuan ketiga dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Salah satu tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2030 adalah secara signifikan mengurangi jumlah mortalitas dan penyakit akibat bahan kimia beracun dan polusi udara, air dan tanah. Konsumsi tembakau merupakan masalah serius di bidang kesehatan yang mengancam pencapaian tiga tujuan agenda pembangunan Indonesia (6).

Dalam upaya menurunkan angka kematian akibat paparan asap tembakau di Indonesia, pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk mengatur kawasan tanpa rokok (KTR). Kawasan tanpa rokok adalah langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengurangi angka perokok di Indonesia yang kian bertambah setiap tahun. Kebijakan KTR ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 tentang Kesehatan. Implementasi dari KTR di lingkungan sekolah didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa asap rokok di lingkungan sekolah, yang tujuan utamanya adalah melindungi para pelajar sebagai generasi muda dari paparan asap rokok berbahaya terutama di lingkungan sekolah dan secara tidak langsung diharapkan dapat menurunkan jumlah perokok anak. Faktanya masih banyak siswa maupun pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang sering melanggar atau bahkan mengabaikan peraturan tersebut padahal kawasan tempat mereka merokok adalah kawasan larangan merokok (7).

Menyikapi permasalahan tersebut, sejak tahun 2010, Kota Surakarta telah menyadari pentingnya menerapkan kawasan bebas asap rokok. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 mengenai Kawasan Tanpa Rokok memerlukan komitmen yang kuat dan langkah tegas dari Pemerintah Kota Surakarta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun kenyataannya, Kota Surakarta masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala terkait penetapan kawasan tanpa asap rokok untuk mewujudkan hak anak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan

sehat (8). Tujuan dari kebijakan kawasan tanpa rokok adalah untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas asap rokok (9).

Berdasarkan uraian latar belakang, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai penerapan kebijakan kawasan bebas rokok di lingkungan Sekolah Menengah Atas Sederajat di Kota-Surakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai referensi informasi mengenai implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan desain *cross-sectional*. Metode tersebut bertujuan untuk menggambarkan objek yang diteliti dan menarik kesimpulan dari fenomena yang diamati menggunakan data angka (10). Populasi dalam penelitian ini mencakup semua 34 SMA dan 49 SMK Negeri dan Swasta yang ada di Kota Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *proportionate random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 68 sekolah yang terdiri dari 8 SMA dan SMK Negeri, 17 SMA Swasta dan 35 SMK Swasta.

Tabel 1.
Proporsi Sampel Penelitian

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Sampel Penelitian				Total Sampel Penelitian
		SMA Negeri	SMA Swasta	SMK Negeri	SMK Swasta	
Banjarsari	35	4	8	2	15	29
Jebres	14	2	4	1	5	12
Laweyan	20	0	5	3	9	17
Pasar Kliwon	7	1	2	1	1	5
Serengan	6	1	1	1	2	5
Total						68

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari sumber data primer. Instrumen yang digunakan berupa angket atau kuesioner yang dikembangkan dari Pedoman Pengembangan KTR Kemenkes RI tahun 2011 dan Lembar Observasi Implementasi KTR di Sekolah. Variabel dari penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara.

Definisi operasional dari variabel penelitian ini sebagai berikut:

1. Komunikasi: implementor menjelaskan tujuan dan manfaat kebijakan kawasan tanpa rokok dan menyampaikan informasi tentang kebijakan tersebut secara terus-menerus kepada semua pihak yang terlibat.
2. Sumber Daya: Implementor mengelola sumber daya yang ada secara efisien untuk mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah.
3. Disposisi: Implementor berupaya membangun dukungan dan disposisi yang positif dari semua pihak terkait yang melibatkan pemahaman bersama tentang pentingnya kebijakan kawasan tanpa rokok serta menjaga konsistensi dalam penegakan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi: Implementor merancang dan mengelola struktur organisasi yang efisien. Hal ini meliputi penugasan peran dan tanggung jawab yang jelas kepada seluruh pihak yang terlibat dan memastikan adanya mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif untuk memastikan kebijakan diterapkan dengan konsisten.

Model analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini yakni analisis univariat. Sebelum disajikan dalam bentuk kategori baik dan kurang, peneliti terlebih dahulu melakukan uji normalitas pada variabel yang ada dalam penelitian. Uji normalitas yang diterapkan adalah uji Saphiro-Wilk karena jumlah sampel dalam penelitian ini kurang dari 100. Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai p-value untuk skor pola komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi adalah 0,000. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi data untuk skor pola komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terdistribusi tidak normal sehingga pengkategorian menggunakan nilai median berdasarkan masing-masing skor. Adapun nilai median dari skor pola komunikasi adalah 4, nilai median dari skor sumber daya adalah 2, nilai median dari skor disposisi adalah 5 dan nilai median dari skor struktur birokrasi adalah 3.

Nilai median tersebut kemudian digunakan untuk mengkategorikan variabel termasuk berjalan baik atau kurang. Sekolah yang memiliki skor pada masing-masing variabel lebih besar atau sama dengan median termasuk kategori baik, sedangkan sekolah yang memiliki skor pada masing-masing variabel kurang dari median termasuk kategori kurang.

HASIL

Karakteristik Responden

Karakteristik responden penelitian terdiri dari jenis kelamin, jabatan, status merokok, dan status keikutsertaan dalam sosialisasi KTR, tersaji dalam tabel 2.

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa sebagian besar responden merupakan laki-laki dengan jumlah 49 orang (72,1%). Selanjutnya, berdasarkan jabatan responden saat ini, mayoritas responden pada penelitian ini adalah guru mapel sebanyak 23 orang (33,8%). Dari 49 responden memiliki jenis kelamin laki-laki, 6 orang diantaranya merupakan seorang perokok aktif (12,2%).

Sebanyak 39 responden telah mengikuti sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok di sekolah. Responden yang paling banyak didelegasikan untuk mengikuti sosialisasi tersebut adalah laki-laki yaitu sebanyak 29 orang (74,4%). Sosialisasi yang pernah diikuti oleh responden pada tahun 2002 hingga 2010 adalah 2 orang (5,3%) sedangkan responden yang telah mengikuti sosialisasi selama 3 tahun terakhir adalah 25 orang (65,8%). Lokasi yang paling banyak menjadi tempat pelaksanaan sosialisasi adalah sekolah (50,0%) dan puskesmas setempat (13,1%).

Tabel 2.
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	n	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	49	72,1
Perempuan	19	27,9
Jabatan		
Kepala Sekolah	14	20,6
Waka Kurikulum	4	5,9
Waka Kesiswaan	17	25,0
Waka Humas	4	5,9
Waka Ketenagaan	1	1,5
Waka Sarpras	2	2,9
Staf Kesiswaan	3	4,4
Guru	23	33,8
Perokok Aktif		
Ya	6	12,2

Karakteristik Responden	n	Persentase
Tidak	43	87,8
Keikutsertaan Sosialisasi		
Pernah	39	57,4
Belum	29	42,6

Analisis Univariat

Hasil analisis pola komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pada implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3, menunjukkan bahwa pola komunikasi pada implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah tergolong baik (57,4%), sumber daya pada implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah tergolong baik (70,6%), disposisi pada implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah tergolong baik (64,7%), dan struktur birokrasi pada implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah tergolong baik (76,5%).

Tabel 3.

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Gambaran Pola Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi

Variabel	n	Persentase
Pola komunikasi		
Baik	39	57,4
Kurang	29	42,6
Sumber daya		
Baik	48	70,6
Kurang	20	29,4
Disposisi		
Kurang	44	64,7
Baik	24	35,3
Struktur birokrasi		
Baik	52	76,5
Kurang	16	23,5

Masing-masing variabel memiliki indikator yang terdeskripsikan secara kuantitatif sebagai berikut:

Berdasarkan tabel 4, 85,3% sekolah sudah memasang tanda pengumuman tentang kebijakan kawasan tanpa rokok dan poster/brosur tentang bahaya merokok atau informasi mengenai kawasan tanpa rokok (77,9%). Pengumuman tersebut paling banyak terpasang di mading, ruang tunggu tamu dan lahan parkir (11,8%) sedangkan poster/brosur paling banyak terpasang di mading (17,6%). Sebanyak 73,5% sekolah telah mengadakan sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok. Sosialisasi tersebut paling banyak dilaksanakan pada tahun 2023 (77,5%) dengan sasaran dari sosialisasi tersebut adalah siswa (61,2%). Sosialisasi tersebut disampaikan oleh pihak internal sekolah (55,1%) seperti kepala sekolah, bidang kesiswaan, maupun guru BK dan pihak eksternal (44,9%) seperti kader puskesmas, Dinas Kesehatan, dan lainnya. Sebanyak 76,5% sekolah telah mengadakan penyuluhan tentang bahaya rokok. Penyuluhan tersebut paling banyak dilakukan pada tahun 2023 (61,2%). Adapun narasumber dari kegiatan penyuluhan tersebut adalah pihak eksternal sekolah (79,6%) seperti kader puskesmas, Dinas Kesehatan, dan lainnya serta pihak internal sekolah (20,4%) seperti kepala sekolah, guru, maupun siswa.

Tabel 4.
Indikator Penilaian Pola Komunikasi

Indikator Pola Komunikasi	Sudah		Belum	
	n	%	n	%
Pemasangan pengumuman mengenai kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah	58	85,3	10	14,7
Pengadaan sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah	50	73,5	18	26,5
Pengadaan penyuluhan tentang bahaya merokok	52	76,5	16	23,5
Pemasangan poster/brosur tentang bahaya merokok dan informasi mengenai kawasan tanpa rokok	53	77,9	15	22,1

Berdasarkan tabel 5 dibawah, diperoleh hasil bahwa sebanyak 77,9% sekolah telah memiliki tenaga yang ditugaskan untuk memantau jalannya kebijakan kawasan tanpa rokok. Mayoritas guru yang menjadi pemantau kebijakan tersebut adalah kesiswaan (8,8%) dan guru BK (5,9%). Sebanyak 77,9% sekolah telah memiliki tenaga yang ditugaskan untuk melakukan bimbingan dan motivasi pada siswa yang kecanduan merokok. Adapun tenaga yang paling banyak ditugaskan dalam hal ini adalah guru BK 30,9%. Di sisi lain, hanya 26,2% sekolah yang telah memiliki satuan tugas anti rokok. Beberapa responden menyatakan bahwa masalah rokok di sekolah belum menjadi hal yang urgent sehingga sekolah belum membentuk satuan tugas anti rokok.

Tabel 5.
Indikator Penilaian Sumber Daya

Indikator Sumber Daya	Sudah		Belum	
	n	%	n	%
Terdapat tenaga yang ditugaskan untuk memantau jalannya kebijakan kawasan tanpa rokok	53	77,9	15	22,1
Terdapat satuan tugas anti rokok di sekolah untuk mendukung berjalannya program kawasan tanpa rokok	18	26,5	50	73,5
Terdapat pihak yang membimbing dan memotivasi siswa yang kecanduan merokok	53	77,9	15	22,1

Berdasarkan tabel 6 dibawah, diperoleh hasil bahwa warga sekolah telah menegur orang yang masih merokok di lingkungan sekolah 98,5% dan sebanyak 73,5% responden menerangkan bahwa tenaga kependidikan maupun staf yang merupakan perokok aktif tidak merokok di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga telah memberlakukan larangan penjualan rokok 97,1% dan pengiklanan dari perusahaan rokok 85,3%. Kedua larangan tersebut diketahui telah diberlakukan sejak awal sekolah berdiri 65,6%. Beberapa responden lainnya menyebutkan bahwa larangan tersebut mulai diberlakukan sejak tahun 2015 (9,4%), 2016 (3,1%), 2017 (3,1%), 2019 (6,3%), 2020 (9,4%) dan 2023 (3,1%). Selain itu, diketahui bahwa hanya sebanyak 17 (25%) sekolah yang telah memberikan reward bagi yang berani melaporkan kejadian merokok di sekolah. Adapun reward yang diberikan oleh sekolah berupa penambahan poin bagi siswa (43,75%) dan apresiasi (56,25%).

Tabel 6.
Indikator Penilaian Disposisi

Indikator Disposisi	Sudah		Belum	
	n	%	n	%
Tenaga kependidikan, staf dan siswa menegur orang yang masih merokok di lingkungan sekolah	67	98,5	1	1,5
Tenaga kependidikan, staf dan seluruh pihak yang termasuk perokok aktif tidak merokok di lingkungan sekolah	50	73,5	18	26,5
Sekolah menolak bentuk kerjasama dari industri rokok seperti sponsor ataupun beasiswa	67	98,5	1	1,5
Sekolah memberlakukan larangan penjualan rokok di lingkungan sekolah	66	97,1	2	2,9
Sekolah memberlakukan larangan segala bentuk iklan dari perusahaan rokok di lingkungan sekolah	58	85,3	10	14,7
Sekolah memberikan <i>reward</i> bagi yang melaporkan kejadian merokok di lingkungan sekolah	17	25,0	51	75,0

Berdasarkan tabel dibawah, diperoleh informasi bahwa sebanyak 91,2% sekolah telah memiliki kebijakan tertulis tentang kawasan tanpa rokok di sekolah. Kebijakan tersebut tertuang dalam tata tertib (50%), peraturan sekolah (45,2%), SK (1,6%) dan Buku Panduan Siswa (3,2). Sebagian besar responden menerangkan bahwa kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak sekolah didirikan (57,5%). Sebanyak 58,8% responden menjawab bahwa sekolah telah memiliki SPO yang mengatur pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Selanjutnya, sebanyak 87,5% responden menyampaikan bahwa SPO yang ada telah berjalan efektif. Adapun beberapa responden lainnya menilai SPO belum efektif dengan alasan bahwa masih ada beberapa warga sekolah yang masih kurang peduli akan bahaya dari rokok, minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan SPO dan belum ada sanksi yang jelas kepada guru atau tenaga kependidikan yang melanggar. Sebanyak 72,1% sudah ada pengaturan tugas dan tanggung jawab pada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah. Sebanyak 87,8% tugas dan tanggung jawab bagi masing-masing pihak sudah diinstruksikan secara jelas dan terperinci. Pihak sekolah telah menerapkan sanksi kepada siapapun yang melanggar kebijakan yang telah dibuat (83,8%). Sanksi yang diberikan cukup beragam mulai dari pemberian poin pelanggaran, pembinaan, pemberian surat peringatan, sanksi sosial, pemanggilan orang tua/wali hingga skorsing dan pengembalian kepada orang tua/wali.

Tabel 7.
Indikator Penilaian Struktur Birokrasi

Indikator Struktur Birokrasi	Sudah		Belum	
	n	%	n	%
Terdapat kebijakan tertulis tentang kawasan tanpa rokok di sekolah	62	91,2	6	8,8
Terdapat Standar Prosedur Operasional (SPO) yang mengatur pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok	40	58,8	28	41,2
Terdapat pengaturan tugas dan tanggung jawab bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok	49	72,1	19	27,9
Terdapat sanksi bagi yang melanggar kebijakan kawasan tanpa rokok yang berlaku	57	83,8	11	16,2

PEMBAHASAN

Pola Komunikasi pada Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah

Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam pengimplementasian KTR di sekolah telah berjalan dengan baik pada 57,4% sekolah yang menjadi sampel penelitian. Indikator komunikasi yang paling banyak telah dilakukan adalah pemasangan pengumuman mengenai kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah dan yang paling sedikit dilakukan adalah pengadaan sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah.

Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang disampaikan oleh pemangku kebijakan kepada setiap pelaksana yang terlibat secara jelas, akurat dan konsisten sehingga para pelaksana kebijakan memahami tindakan yang perlu dilakukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut George C. Edward, terdapat 3 dimensi yang menentukan keberhasilan dari komunikasi yakni transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat. Semakin baik komunikasi dan koordinasi, semakin sedikit pula kesalahan yang dapat terjadi (11).

Bersumber pada hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa masih ada 18 sekolah yang belum mensosialisasikan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok kepada target group (kelompok sasaran). Sosialisasi menjadi satu hal yang penting bagi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah. Hal ini dikarenakan sosialisasi merupakan langkah awal dalam menyebarkan informasi mengenai kebijakan yang akan dijalankan (12).

Kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah kepada target group (kelompok sasaran) menyebabkan implementasi kebijakan dari kebijakan kawasan tanpa rokok ini mengalami beberapa hambatan seperti kurangnya koordinasi yang menyebabkan kurangnya sinergi antara pelaksana kebijakan (bagian kesiswaan) dengan guru atau tenaga kependidikan lainnya sehingga masih ditemui guru atau pendidik yang merokok di area lingkungan sekolah. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah belum berjalan maksimal dikarenakan belum ada kebijakan tertulis tentang larangan merokok dan proses komunikasi penerapan kebijakan belum melibatkan para pihak yang berperan dalam implementasi kebijakan (13). Dalam penelitian lainnya disebutkan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok bagi para pegawai di lingkungan SDIT Al-Fahmi Palu belum efektif dikarenakan upaya sosialisasi belum terlaksana secara maksimal sehingga pelaksana kebijakan dan masyarakat belum mengetahui tugas, fungsi, maupun perannya (14). Oleh sebab itu, pihak sekolah perlu meningkatkan pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang telah dibuat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan agar implementasi dari kebijakan tersebut bisa terlaksana secara optimal dan berjalan secara maksimal sesuai dengan yang diinginkan.

Sumber Daya pada Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah

Penelitian menunjukkan bahwa sumber daya dalam pengimplementasian KTR di sekolah telah berjalan dengan baik pada 70,6% sekolah yang menjadi sampel penelitian. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini berupa sumber daya manusia yang bertugas dalam menegakkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Hasil analisis sumber daya pada implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Sekolah Menengah Atas Sederajat se-Surakarta pada dasarnya sudah tergolong baik. Namun, dalam penelitian ini diketahui hanya sebanyak 18 (26,5%) sekolah yang sudah membentuk satuan tugas anti rokok untuk mendukung berjalannya program kawasan tanpa rokok di sekolah. Sejatinya, pembentukan satuan tugas ini dimaksudkan untuk mengawasi kegiatan yang tengah berjalan guna memastikan segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana dan meminimalisir hasil yang tidak diinginkan. Menurut Agustina, pemantauan aktivitas kelompok sasaran (target group) akan memudahkan perencanaan penerapan protokol kesehatan (15).

Kurangnya kelompok kerja anti rokok yang dibentuk oleh sekolah dapat menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa salah satu faktor penghambat penerapan kawasan tanpa rokok di SMP Negeri 21 Semarang adalah kurangnya fungsi dan kewenangan gugus tugas yang bertanggung jawab mengawasi penetapan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah (16). Dalam penelitian lain disebutkan bahwa salah satu penyebab penerapan KTR di SMA Pramita Kota Tangerang belum berjalan secara optimal dikarenakan sekolah tidak membentuk komite atau badan khusus untuk menegakkan kebijakan KTR di sekolah (17). Temuan serupa juga didapatkan dari penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa ada keterkaitan antara sumber daya dengan pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok di SMA (18). Oleh sebab itu, pihak sekolah diharapkan dapat membentuk satuan tugas sebagai upaya dalam mendukung terlaksananya kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah.

Disposisi pada Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah

Penelitian menunjukkan bahwa disposisi dalam pengimplementasian KTR di sekolah telah berjalan dengan baik pada 64,7% sekolah yang menjadi sampel penelitian. Pelaksana perlu memahami apa yang harus mereka lakukan dan memiliki kemampuan untuk menjalankan kebijakan, namun implementor juga perlu memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa secara umum, pihak sekolah telah memiliki disposisi yang baik. Hal tersebut bisa dilihat melalui skor disposisi yang menunjukkan hasil yang baik pada beberapa indikator penilaian seperti warga sekolah menegur orang yang masih merokok di lingkungan sekolah, tenaga kependidikan maupun staf yang merupakan perokok aktif tidak merokok di lingkungan sekolah, penolakan sponsor atau beasiswa dari industri rokok, dan pemberlakuan larangan penjualan dan pengiklanan rokok. Selanjutnya, Jayanti dan Putri menuturkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak lepas dari kemauan para pelaksana dan komitmen kuat mereka terhadap kebijakan yang dilaksanakan (19).

Dukungan sekolah untuk menaati kebijakan KTR memengaruhi tingginya persentase sekolah yang melaksanakan KTR (17). Salah satu upaya pendukung yang dapat dilakukan sekolah agar implementasi dari kebijakan kawasan tanpa rokok mampu berlangsung secara baik adalah dengan memberikan reward kepada pihak yang berani melaporkan tindak pelanggaran yang terjadi. Namun menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui hanya sebanyak 17 (25%) sekolah yang telah menerapkan sistem *reward*.

Kurangnya dukungan dari pihak sekolah dapat menyebabkan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok belum berjalan maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Sutmasa menyatakan bahwa saat ini proses evaluasi hanya berfokus pada kesalahan dan pemberian hukuman. Kondisi ini yang menyebabkan masyarakat menghindari tanggung jawab bahkan tidak memiliki inisiatif atau inovatif dalam penegakkan kebijakan untuk terhindar dari hukuman. Oleh karena itu, perlu diberikan perlakuan terhadap kinerja kebijakan secara seimbang. Jika kinerja dilakukan dengan baik maka harus diberikan apresiasi, begitupun sebaliknya (20).

Reward merupakan salah satu bentuk apresiasi yang terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi maupun kinerja dari pihak yang dilibatkan didalamnya. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2023) mengenai efektivitas pemberian *reward* serta *punishment* terhadap kinerja karyawan di Bank Muamalat KCU Banjarmasin menunjukkan hasil nilai Sig. pada variabel reward sebesar 0,023 dengan nilai $\alpha = 0,05$ ($0,023 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian *reward* memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja karyawan di Bank Muamalat KCU Banjarmasin. Lebih lanjut diketahui tingkat efektivitas pemberian reward dan punishment memiliki persentase sebesar 81% yang menandakan bahwa pemberian reward dan punishment sangat efektif terhadap kinerja karyawan (21). Oleh sebab itu, reward dalam hal ini menjadi hal yang dapat menjadi motivasi setiap pihak yang terlibat agar memiliki kemauan dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.

Struktur Birokrasi pada Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah

Penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam pengimplementasian KTR di sekolah telah berjalan dengan baik pada 76,5% sekolah yang menjadi sampel penelitian. Struktur birokrasi memegang peranan penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Struktur birokrasi yang tidak kondusif akan membuat sumber daya menjadi tidak efisien dan menghambat implementasi kebijakan. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa ada keterkaitan antara struktur birokrasi dengan penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah (22). Struktur birokrasi yang memengaruhi implementasi kebijakan meliputi proses dan langkah-langkah kerja dasar, struktur hierarki, koordinasi, dan kewenangan. Hasil dalam penelitian ini mengenai struktur birokrasi pada implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Sekolah Menengah Atas Se-Surakarta secara umum sudah tergolong baik. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diketahui sebanyak 62 sekolah telah memiliki kebijakan tertulis yang mengatur tentang pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas Sekolah Menengah Atas Sederajat di Kota Surakarta telah memiliki komitmen dalam pengimplementasian kebijakan kawasan tanpa rokok.

Menurut George C. Edward, struktur birokrasi memiliki dua karakteristik utama yaitu Standart Operational Procedur (SPO) dan fragmentasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang baik dalam hal fragmentasi. Fragmentasi merujuk pada pencacahan tanggung jawab suatu kebijakan terhadap banyak lembaga yang berbeda. Mengingat jumlah warga sekolah yang tidak sedikit, maka dibutuhkan penyebaran tugas dan tanggung jawab kepada beberapa pihak yang berbeda. Penyebaran tugas dan tanggung jawab tersebut tentunya perlu diinstruksikan secara jelas dan terperinci agar dapat meminimalisir terjadinya distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Adriana yang menyebutkan bahwa struktur birokrasi menggambarkan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kewenangannya, dengan adanya pembagian kerja yang terorganisir dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam implementasi kebijakan (23).

Selain fragmentasi, dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah juga dibutuhkan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang mengatur pelaksanaan dari kebijakan. Menurut Sailendra, SPO adalah instruksi atau pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa operasional suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar. Dari hasil penelitian ini didapati bahwa masih terdapat 41,2% sekolah yang belum memiliki SPO dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah. Tidak adanya SPO dalam pelaksanaan suatu kebijakan dapat menjadi penghambat dalam tercapainya keberhasilan dari disusunnya kebijakan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Nasyrudin, ketiadaan SPO menyebabkan implementasi suatu kebijakan tidak efektif serta menghambat pengimplementasian kebijakan (16). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zismeda mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA Gajah Mada juga menuturkan bahwasanya implementasi kebijakan tidak berjalan maksimal dikarenakan tidak adanya SPO (24). Oleh karena itu, pihak sekolah yang belum memiliki SPO yang mengatur implementasi dari kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah diharapkan dapat merancang SPO tersebut guna mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah.

KESIMPULAN

Indikator penilaian pola komunikasi pada implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Sekolah Menengah Atas Sederajat di Kota Surakarta secara umum menunjukkan hasil yang baik namun diperlukan adanya peningkatan dalam sosialisasi kebijakan. Indikator penilaian sumber daya berupa adanya tenaga yang ditugaskan untuk memantau jalannya kebijakan KTR dan pihak yang membimbing siswa yang kecanduan rokok menunjukkan hasil yang baik, namun masih banyak sekolah yang belum memiliki satuan tugas anti rokok. Indikator penilaian disposisi secara umum

telah menunjukkan hasil yang baik. Namun, masih sedikit sekolah yang memberikan reward sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pihak yang terlibat didalamnya. Indikator penilaian struktur birokrasi pada implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Sekolah Menengah Atas Sederajat se-Surakarta secara umum menunjukkan hasil yang baik namun diperlukan adanya peningkatan dalam pengadaan Standar Prosedur Operasional (SPO).

Dari hasil penelitian ini, instansi pendidikan dinilai perlu menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk mengatur pelaksanaan kebijakan, mengadakan sosialisasi serta meningkatkan komunikasi dan kerja sama antarpihak yang berpartisipasi dalam penegakan kebijakan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi dan menciptakan sinergi dalam pengimplementasian kebijakan. Selain itu, pihak sekolah juga diharapkan dapat membentuk satuan tugas dan mengadakan reward sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pihak yang berperan dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. Selain itu, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Kota Surakarta dan Dinas Kesehatan Kota Surakarta juga diharapkan dapat membantu dalam mensosialisasikan kebijakan kawasan tanpa rokok yang ada di Sekolah Menengah Atas Sederajat di Kota Surakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua sekolah yang telah berkenan untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Terima kasih berikutnya untuk Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk mengambil data dan melakukan penelitian di wilayah kerja SMA/SMK se-Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Wijana IK, Mudana IN. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Perokok Pasif. Kertha Negara. 2014;2(1):1–5.
2. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). Proceeding 4th Indonesian Conference on Tobacco or Health 2017. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. 2017.
3. Purwandari E, Pubianti E, M MS, Nugroho MD, Freddy. Terapi Berhenti Merokok dengan Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT). War LPM. 2020;23(2):84–93.
4. Hidayati IR, Pujiana D, Fadillah M. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan dan Sikap Siswa Tentang Bahaya Merokok Kelas XI SMA Yayasan Wanita Kereta Palembang Tahun 2019. J Kesehat. 2019;12(2):125–35.
5. Reqyrizendri D, Prihartanti N, Asyanti S. Smoking Among Muslim Students Behavior Case Study in Surakarta. Indig J Ilm Psikol. 2020;5(2):218–30.
6. Hakim HMZ, Fadilla A. Community Perception of Cigarette Consumption Control Policy: A Case Study of Bogor Municipality, West Java. J Aisyah J Ilmu Kesehat. 2021;6(1):103–8.
7. Wardiah R, Thabrany H. Pengetahuan Kawasan Tanpa Rokok dan Pengetahuan Bahaya Merokok dengan Persepsi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok. J Ilm Permas J Ilm STIKES Kendal. 2022;12(3):761–6.
8. Pinakesti KS, Herawati AR, Afrizal T. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Surakarta. J Public Policy Manag Rev. 2023;12(2):205–18.
9. Rahajeng E. Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Perokok di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. J Ekol Kesehat. 2015;14(3):238–49.
10. Listiani NM. Pengaruh Kreativitas dan Motivasi Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Produktif Pemasaran Pada Siswa Kelas XI SMK Negeri 2 Tuban. J Ekon Pendidik Dan Kewirausahaan. 2014;2(2):264–76.

11. Wiguna AR, Meigawati D, Amirulloh MR. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukabumi. *J Ilm Muqoddimah J Ilmu Sos Polit dan Hum.* 2022;6(1):28–37.
12. Yanthi D, Sando W, Hayana. Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMPN 07 Pekanbaru Tahun 2020. *Ensiklopedia J.* 2021;3(2):201–5.
13. Sundoro T, Purnomo PS, Setianingrum PD. Implementation of Bantul Regent Policy Number 18 Year 2016 Regarding Smoke-Free Areas. *J Gov Public Policy.* 2020;7(2):115–27.
14. Firmansyah F, Sudirman S, ... Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Pegawai di Lingkungan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fahmi Palu. *J Kolaboratif* 2019;2(1):737–45.
15. Agustina VT. Pengawasan Kepatuhan Masyarakat oleh Satuan Tugas Covid-19 dalam Penerapan Protokol Kesehatan di Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. *FISIP Univ Galuh.* 2022;2(1):1508–16.
16. Nasyrudin MF. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Sekolah (Studi Kualitatif pada SMP Negeri 21 Semarang). *J Kesehat Masy Univ Diponegoro.* 2013;2(1).
17. Sari DN, Nafisah L, Intiasari AD. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Menengah Atas Swasta Wilayah Perkotaan. *J Kesehat.* 2023;14(1):62–71.
18. Gaol IPL, Cahyo K, Indraswari R. Analisis Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Kota Semarang. *J Kesehat Masy.* 2016;4(5):321–9.
19. Jayanti, Putri NE. Penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMP Negeri 13 Kota Padang. *J Mhs Ilmu Adm Publik.* 2020;2(4):78–84.
20. Sutmasa YG. Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *J Cakrawati.* 2021;04(01):25–36.
21. Annisa. Efektivitas Pemberian Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan Bank Muamalat KCU Banjarmasin. [Skripsi]. UIN Antasari Banjarmasin; 2023.
22. Farahdina S, Cahyo K, Riyanti E. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kelurahan Kota Semarang. *J Kesehat Masy.* 2016;4(3):1096–104.
23. Fallo AR. Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie. *GLORY J Ekon dan Ilmu Sos.* 2020;1(2):1–21.
24. Taruna Z. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gajah Mada Yogyakarta. *J Spektrum Anal Kebijak Pendidik.* 2016;5(6):567–77.